

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan dari penelitian ini:

1. PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Purbalingga.
2. Dana perimbangan yang terdiri dari DBH dan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Purbalingga, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Purbalingga.
3. Dana Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Purbalingga.
4. Dana Desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Purbalingga.
5. Perda Nomor 9 Tahun 2015 tidak efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Purbalingga.

B. Implikasi

Berikut merupakan implikasi pada penelitian ini:

1. Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus mempertahankan dan meningkatkan trend dari PAD sehingga dapat digunakan untuk program menurunkan kemiskinan. PAD yang tinggi akan mendukung pembangunan daerah dan mengentaskan tingkat kemiskinan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD.
2. Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus terus menjaga trend eksistensi pada penerimaan DBH. Dengan adanya penerimaan DBH yang stabil dari pemerintah pusat maka dapat digunakan untuk penurunan tingkat kemiskinan. Penerimaan DAU dari pemerintah pusat dapat mempertahankan pengelolaannya dikarenakan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Purbalingga. Sedangkan pengelolaan DAK meskipun tidak berpengaruh langsung terhadap kemiskinan pengelolaan DAK harus sesuai dengan prioritas

kebutuhan di Purbalingga. Pemerintah dapat mengelola dana perimbangan dengan akuntabel, transparan, dan profesional.

3. Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus mengevaluasi dan terus mengupayakan optimalisasi anggaran fiskal Kabupaten Purbalingga. Dengan dilakukannya evaluasi dan optimalisasi ini maka dana pembiayaan akan terkendali sehingga tidak membebani anggaran fiskal yang seharusnya digunakan untuk program kesejahteraan masyarakat, namun digunakan untuk membayar dana pembiayaan tersebut.
4. Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan pengawasan langsung dan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Sehingga penggunaan Dana Desa ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya tidak terdapat kebocoran atau penyalahgunaan. Dengan dilakukan pengawasan dan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa maka pengelolaan Dana Desa akan tepat sasaran kepada kebutuhan masyarakat desa. Sehingga Dana Desa akan efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Purbalingga.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan belum cukup efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Pemerintah daerah dapat menambahkan program melek digital dikarenakan zaman sudah berubah menjadi digital sedangkan pada Perda tersebut tidak terdapat optimalisasi pada sektor digital. Sehingga program yang dijalankan tidak relevan dengan tingkat kemajuan zaman.

Berdasarkan hasil penelitian dan implikasi tersebut Kabupaten Purbalingga dapat melakukan kolaborasi *pentahelix* untuk menekan tingkat kemiskinan. Kolaborasi *pentahelix* ini dilakukan oleh lima stakeholder yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan saran yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Purbalingga pada penelitian ini:

Tabel 5.1 Rekomendasi Kolaborasi Stakeholder Untuk Menekan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Purbalingga

No	Stakeholder	Peran
1.	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempertahankan pengelolaan PAD, DBH, dan DAU yang dapat menekan tingkat kemiskinan. ▪ Memberikan perhatian lebih kepada pengelolaan DAK, pembiayaan, dan dana desa supaya lebih efektif untuk menekan tingkat kemiskinan. ▪ Memberikan perhatian lebih kepada Perda Nomor 9 Tahun 2015 diharapkan melakukan rekonstruksi ulang pada isi Perda sehingga lebih efektif untuk menekan kemiskinan. ▪ Berkolaborasi dengan akademisi untuk menciptakan program pengentasan kemiskinan sesuai dengan teori. ▪ Memberikan dukungan dan pelatihan kepada pelaku usaha di Purbalingga sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menekan tingkat kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja.
2.	Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menciptakan terobosan baru untuk mengentaskan kemiskinan. ▪ Memperkuat lembaga pemerintahan dalam merumuskan kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan berdasarkan teori. ▪ Membina para pelaku wirausaha yang berpotensi untuk menjadi perusahaan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menekan tingkat kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja.
3.	Wirausahawan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menciptakan potensi usaha baru yang berdaya saing.

-
- Berkolaborasi dengan pemerintah dan akademisi untuk mengelola dan menciptakan inovasi usaha baru.
 - Mengembangkan unit usaha dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Purbalingga.
4. Media
- Mempromosikan potensi yang dimiliki Kabupaten Purbalingga.
 - Mempromosikan usaha-usaha yang dilakukan oleh para wirausahawan.
 - Mempromosikan produk-produk lokal Kabupaten Purbalingga.
5. Masyarakat
- Mengikuti dan aktif dalam menciptakan inovasi usaha baru.
 - Mendukung program pengembangan pemerintah dan turut serta memberikan saran bagi kemajuan Kabupaten Purbalingga.
 - Mendukung produk-produk lokal Kabupaten Purbalingga.
-